

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Value for money*

a. Dasar Hukum *Value for money*

Reformasi muncul akibat adanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia. Salah satu unsur reformasi total itu adalah pemberian otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten dan kota secara proporsional, sehingga muncullah sistem desentralisasi bagi pemerintah di Indonesia yang didasari oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberlakukannya undang-undang tersebut, maka daerah otonom diberikan hak, wewenang serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pengertian *Value for money*

Penilaian kinerja berdasarkan *value for money* (Mahmudi, 2015) adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektifitas suatu kegiatan, program dan organisasi. Pengukuran kinerja *value for money* merupakan bagian terpenting setiap pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Karena pemerintah sebagai wakil rakyat yang dipercaya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Negara harus

mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengukur sampai sejauh mana akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan dana publik apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas. *Value for money* merupakan penghargaan terhadap nilai uang dan merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Pengertian *value for money*. menurut Bastian (2012) merupakan konsep yang meliputi penilaian efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam pengukuran kinerjanya. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi.

Menurut Mardiasmo (2009) *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama- sama. *Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Value for money merupakan pendekatan nilai untuk uang yang artinya dimana nilai uang untuk menilai biaya suatu produk atau layanan terhadap kualitas penyediaan. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama. Pengukuran kinerja *value for money*

memberikan informasi yang dapat membentuk fungsi-fungsi pengendalian serta mendorong tanggung jawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Oleh karena itu, *value for money* dapat membantu pihak manajemen dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Indikator kinerja harus dapat memberikan manfaat kepada pihak internal yaitu berperan untuk menunjukkan, memberikan indikasi atau memfokuskan perhatian pada bidang yang relevan dilakukan tindakan perbaikan maupun kepada pihak eksternal yaitu mengontrol dan sekaligus memberikan informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan *value for money* yaitu pengukuran anggaran berbasis kinerja yang bersifat ekonomis, efisiensi, dan efektifitas

c. Tujuan *Value for money*

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomis: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya. Efisiensi: Berdaya guna dalam penggunaan sumber daya. Efektifitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan lain yang dikehendaki terkait pelaksanaan *value for money* adalah (Mahmudi, 2015):

- 1) Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik.
- 3) Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input

- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
- 5) Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

d. Pengukuran dengan pendekatan *Value for money*

1) Ekonomis

Ekonomis adalah terkait dengan penghematan anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Tingkat ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja (Mahmudi, 2015)

Mardiasmo (2009) ekonomis merupakan pengukuran yang mempertimbangkan masukan yang digunakan. Ekonomis merupakan ukuran yang relatif. Pernyataan yang berhubungan dengan pengukuran ekonomis adalah:

- a) Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada yang dianggarkan oleh organisasi?
- b) Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c) Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Pengukuran ekonomis membutuhkan data-data anggaran

pengeluaran dan realisasinya. Untuk mencocokkan seberapa besar tingkat ekonomis suatu anggaran berdasarkan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Secara matematis, ekonomis merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. Berikut ini formula untuk pengukur tingkat ekonomis menurut (Mahmudi. 2015);

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Input Value}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 kriteria tingkat ekonomis anggaran sebagai berikut:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran dikatakan sangat ekonomis.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran dikatakan ekonomis.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran dikatakan cukup ekonomis.
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran dikatakan kurang ekonomis.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat tidak ekonomis

2) Efisiensi

Efisiensi terkait dengan hubungan antara output berupa barang atau pelayanan yang di hasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk

menghasilkan output tersebut menurut Mahmudi, (2015). Sedangkan. Menurut (Bastian, 2012) efisiensi dapat diukur dengan rasio antara output dengan input. Apabila semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per input. Selain itu menurut (Mardiasmo, 2012) menjelaskan bahwa dalam pengukuran kinerja, efisiensi dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Efisiensi alokasi Efisiensi alokasi terkait dengan kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas optimal.
- b) Efisiensi teknis atau manajerial Efisiensi teknis atau manajerial terkait dengan kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keputusan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 kriteria tingkat efisiensi anggaran sebagai berikut:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja

dikatakan kurang efisien.

- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak efisien

3) Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dinyatakan telah berjalan dengan efektif. Efektifitas hanya menilai apakah suatu program/kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini formula pengukuran efektifitas: Efektifitas dapat diukur dengan rasio antara outcome dan output. Berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dapat diukur dengan tingkat efektifitas dari kegiatan organisasi tersebut.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 kriteria tingkat efektifitas anggaran sebagai berikut:

- a) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran dikatakan sangat efektif.
- b) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran dikatakan efektif.
- c) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran dikatakan cukup efektif..

- d) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran dikatakan kurang efektif.
- e) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran dikatakan sangat tidak efektif.

2. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Kata “anggaran” merupakan terjemahan dari kata “*budget*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi, kata tersebut sebenarnya berasal dari bahasa Perancis, “*bougette*” yang berarti a small bag atau satu tas kecil. Kata “*budget*” tersebut pertama kali digunakan secara formal sebagai suatu rencana keuangan pemerintah pada tahun 1733, yaitu ketika Menteri Keuangan Inggris membawa satu tas kecil yang berisi proposal keuangan pemerintah yang akan disampaikan kepada parlemen,

Menurut Mulyadi, (2010) anggaran merupakan rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan suatu institusi atau lembaga tertentu untuk suatu periode di masa yang akan datang. Menurut Yanto, (2022) anggaran atau lengkapnya business budget adalah salah satu bentuk berbagai rencana yang mungkin disusun, meskipun tidak setiap rencana dapat disebut sebagai anggaran. anggaran juga dapat diartikan sebagai hasil menyusun anggaran, sementara perencanaannya sendiri disebut penganggaran.

Penganggaran adalah proses menyusun rencana tertulis mengenai

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang Anggaran (budget) merupakan hasil yang diperoleh setelah tugas perencanaan, sedangkan menurut (Mahmudi, 2016) Anggaran merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian manajemen yang berperan penting dalam suatu organisasi yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai anggaran yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya untuk periode satu tahun.

Berdasarkan pengertian anggaran menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana terperinci dan menyeluruh yang disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun yang dapat membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya tertentu yang diperhitungkan pula.

b. Fungsi Anggaran

Anggaran dapat memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut.

1) Fungsi Perencanaan

Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntun pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang.

2) Fungsi Pelaksanaan

Anggaran merupakan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan,

sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan (laba).

3) Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan (*controlling*).

Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan.

Sementara itu, Savitri, (2018) kegunaan atau fungsi dari anggaran di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Sebagai Pedoman Kerja

Anggaran atau budget berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan targettarget yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.

2) Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat pengoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat didalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan.

3) Sebagai Alat Pengawasan Kerja

Budget dapat berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti membandingkan antara apa yang tertuang didalam budget apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses target bekerja ataukah kurang sukses dalam

meraih target dalam bekerja.

c. Manfaat Anggaran

Selain memiliki kegunaan atau fungsi yang kuat, anggaran juga memiliki banyak manfaat yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan. Savitri, (2018) beberapa manfaat anggaran yaitu :

- 1) Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
- 2) Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- 3) Dapat memotivasi pegawai.
- 4) Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada pegawai.
- 5) Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu.
- 6) Sumber daya, seperti: tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
- 7) Alat pendidikan bagi para manajer.

Savitri, (2018) beberapa manfaat anggaran tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek.

Anggaran sebagai alat perencanaan jangka pendek dan merupakan kesanggupan manajer pusat pertanggungjawaban untuk melaksanakan program atau bagian dari program jangka pendek. Dalam penyusunan anggaran, manajer pusat

pertanggungjawaban harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan luar dan kondisi perusahaan.

2) Membantu mengoordinasikan rencana jangka pendek anggaran.

Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasinya agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Koordinasi harus diusahakan, jadi tidak dapat diharapkan berjalan secara otomatis karena setiap individu di dalam organisasi mempunyai kepentingan dan persepsi yang berbeda terhadap tujuan organisasi.

3) Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat pertanggungjawaban.

Jika organisasi yang diinginkan berfungsi secara efisien, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui berbagai unit dalam organisasi tersebut. Komunikasi meliputi penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijakan, rencana, pelaksanaan dan penyimpangan yang timbul. Dalam penyusunan anggaran, berbagai unit dan tindakan organisasi berkomunikasi dan berperan serta dalam proses anggaran.

4) Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

Anggaran dalam penyusunannya mengikut sertakan para

pelaksana sehingga dapat digunakan untuk memotivasi mereka di dalam melaksanakan rencana, mencapai tujuan sekaligus untuk mengukur prestasi mereka. Memotivasi para pelaksana dapat dilakukan dengan memberikan insentif dalam bentuk uang, penghargaan, dan sebagainya kepada mereka yang mencapai prestasi.

- 5) Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya.

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksanaan sehingga dapat ditentukan apakah penyimpangan yang timbul sudah menjadi hal yang dapat merugikan perusahaan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

a. Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sering disebut APBN merupakan rencana keuangan Negara tahunan pemerintahan Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). Semua penerimaan yang menjadi hak Negara dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara serta pembiayaan Negara

dalam satu tahun anggaran harus dimasukkan di APBN

APBN menurut Undang-Undang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran APBN diusulkan oleh Presiden untuk kemudian disetujui oleh DPR, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang..

Di Indonesia, istilah "Anggaran Pendapatan dan Belanja" dipakai secara resmi dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945. dan di dalam perkembangan selanjutnya ditambahkan kata Negara untuk melengkapinya sehingga menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jadi secara harfiah, Postur APBN dapat didefinisikan sebagai "bentuk rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan bernegara". Melalui Postur APBN, publik dapat menilai perkembangan kinerja kebijakan fiskal, kondisi keuangan, kesinambungan fiskal, serta akuntabilitas Pemerintah.

b. Dasar Hukum Penyusunan APBN

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan APBN diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Landasan ini terdapat pada batang tubuh UUD 1945 Amandemen Bab VIII pasal 22D dan 23. Bunyi kedua pasal tersebut yaitu :

1) Pasal 22D

- a) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- b) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai APBN dan menyampaikan hasilnya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

2) Pasal 23

- a) APBN sebagai wujud dan pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- b) RUU APBN diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD Apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan oleh presiden, Pemerintah menjalankan APBN tahun lalu

c. Tujuan APBN

APBN digunakan untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu 4 tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. APBN memegang peran penting dalam kehidupan negara Indonesia. Peran penting APBN ini tercermin dalam 4 (empat) tujuan penyusunan APBN. Tujuan tersebut ialah sebagai berikut:

- 1) Memenuhi amanat UU

APBN disusun sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan pemerintah secara kredibel. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada dasar hukum APBN, APBN dibuat dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945. Amanat tersebut tersebut tertuang dalam pasal 22 dan 23 UUD 1945.

2) Pedoman dalam mengelola keuangan Negara

APBN bertujuan sebagai pedoman untuk seluruh kegiatan pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini, APBN bertugas sebagai instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

3) Implementasi cari kebijakan fiskal

APBN sebagai penerapan kebijakan fiskal diperlihatkan melalui pengendalian pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Penerapan kebijakan fiskal ini dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah melalui berbagai kebijakan pajak dan atau nonpajak serta kebijakan belanja.

4) Mendukung pencapaian sasaran pembangunan

APBN disusun oleh pemerintah dengan didasarkan semangat dari rakyat dan untuk rakyat. Hal ini menjadikan APBN diperuntukan bagi

pembangunan nasional, baik dalam bidang infrastruktur, ekonomi, maupun sosial tujuan akhir, APBN diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

d. Fungsi APBN

Selain keempat tujuan di atas, APBN mempunyai 6 fungsi. Fungsi tersebut terdiri dari 3 fungsi kebijakan fiskal dan 3 fungsi manajemen. Berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa APBN memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Fungsi otorisasi,
bahwa APBN sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan.
- 2) Fungsi perencanaan,
bahwa anggaran negara sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- 3) Fungsi pengawasan,
bahwa anggaran negara sebagai pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fungsi alokasi,
bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5) Fungsi stabilisasi,

bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi otorisasi, perencanaan dan pengawasan adalah 3 fungsi yang berhubungan dengan fungsi manajemen. Sedangkan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi adalah fungsi yang berkaitan dengan fungsi kebijakan fiskal. APBN merupakan wujud dari pengelolaan atas keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. APBN merupakan arti sempit dari Keuangan Negara, dan memiliki batasan waktu yang bersifat tahunan.

e. Struktur APBN

Secara garis besar struktur APBN Terdiri dari

1) Pendapatan Negara

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan perpajakan sebagai instrumen fiskal dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan melanjutkan beberapa insentif perpajakan secara lebih selektif dan terukur. Sementara itu, komponen PNBPN terutama akan didukung dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), penyelenggaraan layanan, serta pendapatan atas pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh Negara. PNBPN dipengaruhi banyak faktor antara lain harga komoditas, tingkat

produksi atau jumlah pelayanan, tingkat harga atau tarif, sistem administrasi, dan kebijakan pemerintah. Adapun jenis-jenis Pendapatan Negara adalah sebagai berikut.

2) Penerimaan Dalam Negeri

a) Penerimaan Perpajakan

Pendapatan Dalam Negeri Indonesia didominasi oleh Penerimaan Perpajakan yang meskipun dari tahun ke tahun tumbuh namun mengalami fluktuasi kinerja yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan kinerja perdagangan internasional. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya dalam melakukan perbaikan administrasi perpajakan yang pada akhirnya juga secara langsung memengaruhi kinerja pemungutan perpajakan di Indonesia. Perbaikan yang dilakukan pada sistem administrasi dan penguatan database perpajakan sangat berpengaruh signifikan bagi pengawasan dan penegakan kepatuhan wajib pajak. Penerapan SPT elektronik, e-faktur, pelayanan mobile tax unit telah memberikan jangkauan pelayanan pajak yang lebih luas dan mudah sehingga mampu memberikan pengaruh positif bagi kepatuhan wajib pajak. Adapun Penerimaan Pajak sendiri bersumber dari :

1. Penerimaan Pajak

- i. Pajak Penghasilan
- ii. PPh Migas
- iii. PPh Nonmigas

2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah
3. Pajak Bumi dan Bangunan



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Sumber : Bagan Struktur Organisasi KPPBC TMP B Sidoarjo

Sumber Pendapatan Dalam Negeri lainnya berupa Kepabeanan dan Cukai. Penerimaan cukai menjadi kontributor utama sekaligus. mencatat pertumbuhan paling signifikan sebagai dampak kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok. Selain itu, bea masuk dan bea keluar juga mampu tumbuh di tengah ketidakpastian global yang memengaruhi perdagangan internasional. Guna mencapai target penerimaan dibidang Kepabeanan dan Cukai. maka Pemerintah mengambil kebijakan berupa pengembangan layanan Kepabeanan dan Cukai berbasis digital, melakukan ekstensifikasi barang kena cukai, dan mengenakan cukai plastik untuk semua bahan baku yang mengandung plastik. Adapun rincian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai adalah sebagai berikut:

- i. Kepabeaan dari Cukai

- a. Cukai
- b. Pajak Perdagangan Internasional
 - i. Bea Masuk
 - ii. Bea Keluar

4. Kinerja Keuangan

a. Definisi kinerja keuangan

Kinerja merupakan suatu bagian dari sebuah proses, hasil dan daya guna. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan kinerja, seperti lingkungan kerja, kelengkapan kerja, budaya kerja. Motivasi, kemampuan pegawai, struktur organisasi, kepemimpinan dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengkaji kinerja tidak lepas dari beberapa teori yang berhubungan dengan kinerja sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Secara etimologis, kinerja adalah sebuah kata yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “kerja” yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, bisa pula berarti hasil kerja. Sehingga pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kristanti, (2016) menyatakan bahwa “Suatu tahapan dalam pencapaian dari pelaksanaan kegiatan/program untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi atau perusahaan”. Sedangkan menurut PP No. 8 Tahun 2006. menyatakan bahwa “kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu, baik dalam aspek penghimpunan dana atau penyaluran dana. Biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, serta profitabilitas. Kinerja keuangan adalah hal yang penting bagi perusahaan, baik bagi internal perusahaan maupun pihak eksternal yang terlibat dengan perusahaan. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai laporan kajian keuangan perusahaan yang diperoleh dari periode tertentu, dengan tujuan untuk mengetahui alur keuangan perusahaan. Evaluasi keuangan sangat penting bagi perusahaan.

Fahmi, (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Isna dan Ayu, (2015) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektifitas, efisiensi dan ekonomis.

b. Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan dikenal juga dengan *performing measurement*. Dalam laporan keuangan, tentunya akan berhubungan dengan

pengukuran kinerja keuangan. Dari pengukuran ini, dapat dilihat kualifikasi serta efektifitas dari suatu perusahaan. Untuk menilai kinerja suatu perusahaan, dapat diketahui dengan berbagai analisis tergantung pada tujuan pemakaiannya. Ada banyak pihak yang berkepentingan dengan hasil analisis

Pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif murah dan berkualitas. Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator. Sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan laporan ini dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yang dijadikan dasar penilaian kinerja perusahaan (Machfudz, 2009).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Keuangan merupakan manifestasi keberhasilan dan kegagalan kinerja operasional sehingga menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan

c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

(Mulyadi, 2010) tujuan pengukuran kinerja keuangan adalah untuk memotivasi karyawan dalam memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar mendapatkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Mahmudi (2010) mengidentifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik yaitu :

- 1) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi.
- 2) Menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai.
- 3) Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya.
- 4) Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian reward.

d. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan

Manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan :

- 1) Mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan
Dengan diukur kinerjanya, instansi akan lebih terdorong untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan akuntabel.
- 2) Mengevaluasi efisiensi, efektifitas, dan ekonomis penggunaan anggaran
Pengukuran *value for money* memberikan penilaian komprehensif dari sisi efisiensi, efektifitas, dan ekonomis sehingga instansi dapat melihat area mana yang perlu diperbaiki.
- 3) Mendukung perencanaan anggaran yang lebih baik Hasil pengukuran dapat digunakan untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran di masa mendatang agar lebih efektif dan efisien.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik penggunaan anggaran yang lebih ekonomis, efisien dan efektif, kualitas pelayanan publik yang diberikan instansi akan semakin meningkat.

- 5) Menunjukkan komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi
Pengukuran *value for money* mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja instansi dalam pengelolaan keuangan negara.

e. Kelebihan dalam Pengukuran Kinerja Keuangan

- 1) Mengintegrasikan tiga aspek penting (ekonomi, efisiensi, efektifitas) dalam satu kerangka pengukuran.
- 2) Dapat dibandingkan antar instansi maupun dari tahun ke tahun untuk mendorong kompetisi.
- 3) Menggunakan indikator kuantitatif sehingga terukur dan dapat diverifikasi.
- 4) Menilai kinerja tidak hanya dari aspek input tetapi juga output dan outcome.
- 5) Dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan dan peningkatan kinerja

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan Mutmainnah, (2021) tentang Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode *Value for money* pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020. untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan konsep *Value for money*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan

mengambil data APBD dan RAPBD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan Rasio ekonomi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020 diperoleh kategori "ekonomis". Rasio efisiensi, pada tahun 2018 diperoleh kategori "kurang efisien", sedangkan pada tahun 2019-2020 diperoleh kategori "tidak efisien" dan Rasio efektifitas periode 2018-2020 diperoleh kategori "sangat efektif". Berdasarkan hasil penelitian, penerapan konsep *Value for money* dinilai baik untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena dapat memberikan gambaran kinerja yang lebih terstruktur dan komprehensif. Untuk perbedaan penelitian ini menggunakan Rasio Ekonomis dan kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Rudianto, (2023) dengan judul Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh periode anggaran 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas anggaran belanja tahun 2018-2022 secara keseluruhan cukup efektif. tingkat efisiensi anggaran belanja tahun 2018-2022 secara keseluruhan cukup efisien. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh disarankan untuk meningkatkan tingkat efektifitas dan efisiensi dengan memperbaiki dan mengevaluasi setiap

kekurangan yang terjadi baik dari segi program maupun anggaran. pentingnya analisis efektifitas dan efisiensi anggaran dalam menilai kinerja pemerintah dan menjamin pelayanan masyarakat yang relatif besar. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian Kualitatif dan Menggunakan Rasio Ekonomis lalu kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan konsep Value For Money

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Suhendro (2024) dengan judul Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah serta Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti menguji korelasi antara tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran instansi pemerintah dengan kualitas serta keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Penulis menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menjabarkan bahwa efisiensi bukan sekadar memangkas biaya secara asal, melainkan bagaimana sumber daya yang ada menghasilkan output yang optimal. Ketika suatu instansi mampu mencapai target (efektif) sekaligus menghemat anggaran secara rasional (efisien), tingkat deviasi atau penyimpangan anggaran akan mengecil. Untuk perbedaan dari peneliti terletak pada objek penelitian dan kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan efisiensi dan efektifitas

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Rahman A,Z dan Saputra F,L (2022) dengan judul Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap. Peneliti mengukur menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang bersumber dari pajak

dan retribusi daerah untuk melihat performa pengumpulan pendapatan. Penelitian ini membedah operasionalisasi rumus rasio secara terbuka. Untuk efisiensi, penilaian didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk efektivitas, dinilai dari realisasi pendapatan dibandingkan dengan target awal. Untuk perbedaan dari peneliti terletak pada objek penelitian dan kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan efisiensi dan efektifitas

Dika Hunsu Sanjaya & Maswar Patuh Priyadi (2019) dengan judul Analisis Value for Money dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan pendekatan *Value for Money* yang merupakan konsep evaluasi kinerja sektor publik berdasarkan tiga indikator utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana penggunaan sumber daya publik memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan tujuan pelayanan publik. Hasil dari penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan dinilai telah berhasil dalam aspek ekonomis, yang ditunjukkan melalui realisasi anggaran yang lebih hemat. Kinerja dinas menunjukkan peningkatan output, yang berarti bahwa dengan sumber daya yang tersedia, dinas mampu menghasilkan lebih banyak layanan atau capaian kerja. Ini mencerminkan efisiensi dalam proses kerja dan pemanfaatan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Surabaya telah menunjukkan kinerja yang baik berdasarkan prinsip *Value for Money*. Ketiga aspek utama ekonomis, efisiensi, dan

efektivitas telah terpenuhi. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian Kualitatif dan Menggunakan Rasio Ekonomis dan Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan konsep Value For Money

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Isham Harianda, (2019) Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Perspektif *Value For Money* metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif kualitatif Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama adalah bagaimana instansi tersebut menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengelola pajak daerah secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja, yang menjadi indikator keberhasilan dalam penerapan prinsip *Value for Money*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian Kualitatif dan Menggunakan Rasio Ekonomis dan kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan konsep Value For Money

C. Kerangka Berpikir

Menganalisis Kinerja Keuangan adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu, Data yang digunakan adalah Laporan

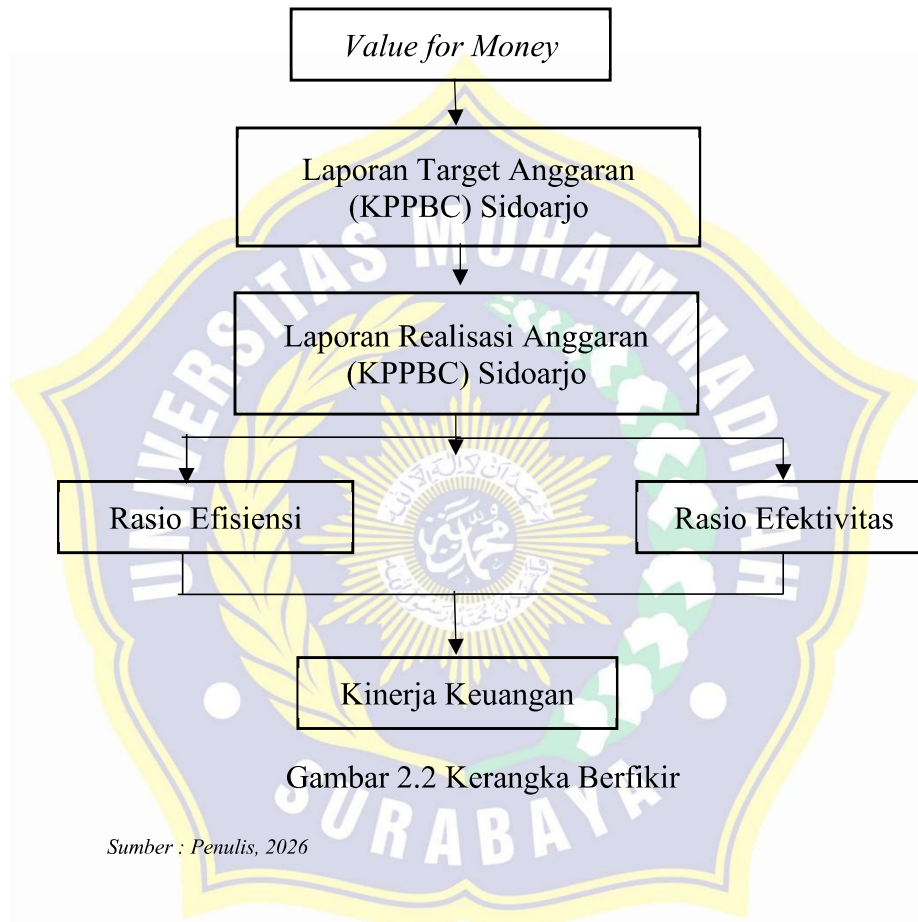
Realisasi Anggaran tahun 2020-2023 yang bersumber dari Divisi Perbendaharaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Sidoarjo dan Peneliti melakukan penelitian dengan pengukuran *value for money*. *Value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada unit-unit kerja pemerintah dan merupakan indikator yang memberikan informasi kepada kita apakah anggaran (dana) yang di belanjakan menghasilkan suatu nilai

Rasio Efektifitas menggambarkan perbandingan antara realiasi pendapatan dengan targetnya. Kemampuan dalam menjalani tugasnya dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai melebihi seratus persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan yang semakin baik. Rasio Efisiensi menggambarkan antara besarnya biaya yang di keluarkan dengan realisasi . Kinerja dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja semakin baik.

menggunakan beberapa rasio di atas dapat diketahui Kinerja Kantor pengawasan dan pelayanan Bea & Cukai Sidoarjo. Jika semua rasio di atas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka Kinerja Kantor Pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Sidoarjo dapat dikatakan baik. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kinerja organisasi tersebut, peran kepemimpinan yang efektif menjadi faktor kunci yang tidak dapat diabaikan. Seorang pemimpin yang visioner, mampu merumuskan strategi yang berorientasi pada pencapaian hasil, serta memiliki kemampuan untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai, akan sangat berpengaruh positif

terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Sidoarjo. Kepemimpinan yang efektif, didukung oleh pengambilan keputusan yang tepat, akan menjadi katalisator bagi optimalisasi kinerja keseluruhan organisasi tersebut

Berikut ini di tampilkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

Sumber : Penulis, 2026